ISSN : 2302-576X

JURNAL COMMUNITY SOCIETY
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUPANG

VOLume. III, Edisi No. 3 Juli-Desember 2013

ISSN 2302-576X

1. Bentuk Pola Asuh Orang Tua Dalam Membantu Anak terhadap pengembangan disiplin diri anak Di Kelurahan Nunhila Kecamatan Alak Kota Kupang
Idris/ Sarifudin Ahmad.....1-13
2. Deskripsi Adat Waizaki Sebagai Nilai Budaya Masyarakat Di Desa Nggorea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende
Burhan Kiko/Latif Kamaluddin.....14-23
3. Pensyaratan Perjanjian Internasional Dalam Dimensi Epistemologi Welem Nggonggoek.....24-38
4. Hukum Dan Kebijakan Investasi
Burhanudin Gesi/ Gasim.....39-49
5. Tingkat Pendapatan Orang Tua Dalam Memberikan Motivasi Menyekolahkan Anak- Di Desa Oelomin Kecamatan Neka Mese Kabupaten Kupang
Idris/ Sarifudin Ahmad.....50-60
6. Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Yang Berwawasan Gender Studi Kasus Pada Kelurahan Nefonaek Kecamatan Kota Lama Kota Kupang
Siti Syahida Nurani/ Nurdin.....61-71
7. Penegakan Hukum Kekerasan Terhadap Anak
Rahmad Majid.....72-79
8. Presepsi Masyarakat Terhadap Budaya Lego-Lego Pada Era Modernisasi Di Desa Taman Mataru Kecamatan Mataru Kabupaten Alor.
Wahid Hasyim TRA beni.....80-89
9. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upaya Pemberantasan Perjudian (Studi Kasus di Kelurahan Naikoten I Kota Kupang)
Zainur Wula.....90-99
10. Penanganan Konflik antar Pedagang etnik Pendatang dengan pedagang etnik lokal di kota Kupang (Kajian)
Bacotang.....100-105

PENERBIT

FAK: ILMU SOSIAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
KUPANG 2013

JURNAL COMMUNITY SOCIETY

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUPANG

VOLUME. III, Edisi No. 3 Juli-Desember 2013

ISSN 2302-576X

9 772302 576101

1. Bentuk Pola Asuh Orang Tua Dalam Membantu Anak terhadap pengembangan disiplin diri anak Di Kelurahan Nunhila Kecamatan Alak Kota Kupang
Idris/ Sarifudin Ahmad.....1-13
2. Deskripsi Adat Waizaki Sebagai Nilai Budaya Masyarakat Di Desa Nggorea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende
Burhan Kiko/Latif Kamaluddin.....14-23
3. Pensyaratan Perjanjian Internasional Dalam Dimensi Epistemologi Welem Nggonggoek.....24-38
4. Hukum Dan Kebijakan Investasi
Burhanudin Gesi/ Gasim.....39-49
5. Tingkat Pendapatan Orang Tua Dalam Memberikan Motivasi Menyekolahkan Anak- Di Desa Oelomin Kecamatan Neka Mese Kabupaten Kupang
Idris/ Sarifudin Ahmad.....50-60
6. Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Yang Berwawasan Gender Studi Kasus Pada Kelurahan Nefonaek Kecamatan Kota Lama Kota Kupang
Siti Syahida Nurani/ Nurdin.....61-71
7. Penegakan Hukum Kekerasan Terhadap Anak
Rahmad Majid.....72-79
8. Persepsi Masyarakat Terhadap Budaya Lego-Lego Pada Era Modernisasi Di Desa Taman Mataru Kecamatan Mataru Kabupaten Alor.
Wahid Hasyim TRA beni.....80-89
9. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upaya Pemberantasan Perjudian (Studi Kasus di Kelurahan Naikoten I Kota Kupang)
Zainur Wula.....90-99
10. Penanganan Konflik antar Pedagang etnik Pendatang dengan pedagang etnik lokal di kota Kupang (Kajian)
Bacotang.....100-105

PENERBIT

**FAK: ILMU SOSIAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
KUPANG 2013**

HUKUM DAN KEBIJAKAN INVESTASI*Oleh :**Burhanudin Gesi/ Gasim**Dosen Fakultas Ekonomi**Universitas Muhammadiyah Kupang.***ABSTRAKSI**

Penanaman dan pembentukan modal pada sebuah Negara mutlak diperlukan sebagai konsekuensinya demi meningkatnya tingkat pertumbuhan ekonomi bangsa. Bahwa untuk meningkatkan jumlah investasi yang ditanamkan oleh investor di Indonesia, diperkukan adanya perubahan yang radikal. Salah satu yang perlu dilakukan perubahan adalah perubahan terhadap Undang-Undang nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU Nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Alasan perlunya perubahan kedua undang-undang ini adalah karena tidak sesuai lagi dengan tantangan dan kebutuhan untuk mempercepat perkembangan perekonomian nasional, melalui konstruksi pembangunan hukum nasional dibidang penanaman modal yang berdaya saing dan berpihak kepada kepentingan nasional (*lihat penjelasan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007*).

Pada tahun 2006 pemerintah telah mengajukan rancangan Undang-Undang tentang penanaman modal, dan pada tanggal 29 maret 2007, RUU itu telah disyahkan oleh DPR RI. Rancangan Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Undang-Undang ini terdiri atas 14 bab dan 40 pasal. Ada beberapa syarat yang memudahkan para investor menanamkan modalnya di Indonesia yakni :Kepastian hokum,Transparansi,Tidak membedakan investor, serta,Memberikan perlakuan yang sama kepada investor dalam dan luar negeri (*Kompas, 27 Juli 2006*). Disamping itu, dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal telah diatur tentang fasilitas atau kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada para investor. Kemudahan-kemudahan atau fasilitas itu, meliputi : Fasilitas PPh melalui pengurangan penghasilan netto,Pembebasan atau keringanan bea masuk impor barang modal yang belum bisa diproduksi didalam negeri,Pembebasan bea masuk bahan baku atau penolong untuk keperluan produksi tertentu,Pembebasan atau penangguhan pajak penghasilan (PPn) atas impor barang modal,Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat,Keringanan pajak bumi dan bangunan (PBB),Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan,Fasilitas hak atas tanah,Fasilitas pelayanan keimigrasian, dan Fasilitas perizinan impor.

Pemberian kemudahan ini dimaksudkan agar investor, terutama investor asing mau menanamkan modalnya di Indonesia. Manfaat adanya investasi itu adalah menggerakkan ekonomi masyarakat, menampung tenaga kerja, meningkatkan kualitas masyarakat yang berada di daerah investasi, dan lain-lain.

Katakunci : Investasi asing, negara tuan rumah, investasi asing langsung, dan perusahaan transnasional.

ABSTRACT

Planting and capital formation in a country is absolutely necessary as a consequence for the sake of increasing the nation's rate of economic growth. That to increase the amount invested by the investor in Indonesia, needed radically a change. One of the changes that need to be done is change

the Law No. 1 of 1967 concerning Foreign Investment and Law No. 6 of 1968 on Domestic Investment.

Reasons for changes in both the law is no longer relevant because of the challenge and the need to accelerate the development of the national economy, through the construction of national law in the field of investment and pro-competitive national interests (see explanation of Act No. 25 of 2007). In 2006, the government has proposed a draft law on investment, and on 29 March 2007, the bill has been approved by the House of Representatives. Draft Law, the Law No. 25 of 2007 on capital investment. This law consists of 14 chapters and 40 articles. There are several requirements that facilitate the investor's to invest in Indonesia, namely 1. legal certainty 2. transparency 3. Not discriminate between investors, as well as 4. Give equal treatment to domestic and foreign investors (Reuters, July 27, 2006). In addition, the Act number 25 of 2007 on investment has been arranged on the facilities or the easiness given to investors. Easiness or facility that includes : 5. Income tax facility through reduction of net income, 6. Exemption or reduction of import duties for capital goods can not be produced domestically, 7. Exemption of import duty of raw materials or auxiliary production for certain purposes, 8. Exemption or deferral of income tax (VAT) on the import of capital goods, 9. Depreciation or amortization, 10. Property tax relief (UN), 11. Exemption or reduction of corporate income tax, 12. Facilities land rights, 13. Immigration service facilities, and 14. Import licensing facility.

Provision is intended to ease investors, especially foreign investors willing to invest in Indonesia. Benefits of the investment that is moving the local economy, accommodating labor, improve the quality of the people residing in the area of investment, and others.

Keywords : foreign investment, host country, foreign investment indirectly, and transnational corporations.

PRESPEKTIF ilmu ekonomi dalam konteksnya adalah bagian dari ilmu sosial. Sebagai ilmu sosial, ilmu ekonomi tidak pernah terlepas dari kehidupan dunia nyata. Akan tetapi dalam perkembangannya ilmu ekonomi seolah menjadi "Steril." Krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan berbagai kawasan lain di luar Indonesia, salah satunya disebabkan oleh terlepasnya ilmu ekonomi dari jati dirinya sebagai ilmu sosial.

"Paul Ormerod" dalam bukunya *"The Death of Economics,"*

ekonom berkebangsaan Inggris ini melakukan gugatan yang sangat

fundamental terhadap eksistensi ilmu ekonomi. Menurutnya, ilmu ekonomi saat ini telah gagal menjawab persoalan-persoalan sosial yang sebenarnya menjadi tugas ilmu ekonomi sebagai ilmu sosial. Gugatan-gugatan inilah yang menjadikan Ormerod memilih judul bukunya tersebut sehingga banyak mendapat cacian dari para "ekonom ortodoks."

Karena ilmu ekonomi sudah sedemikian termatematisasi, abstrak dan rumit serta seolah-olah ilmu ekonomi tersebut terpisah dari kehidupan nyata, maka dikatakan ilmu ekonomi telah mati dan tidak mampu menjawab persoalan yang berkembang dan hidup dalam masyarakat. Ilmu ekonomi telah kehilangan "jiwanya" sebagai ilmu sosial. Ilmu ekonomi telah kehilangan jati

dirinya. Ilmu ekonomi sudah terlalu steril dan positivistik. Ilmu ekonomi seolah tidak terkait dengan ilmu-ilmu lain. Pada hal persoalan di masyarakat sangat kompleks. Karena adanya kohesi social, masalah-masalah ekonomi tidak pernah terpisah dari masalah sosial lainnya.

Apa jati diri ilmu ekonomi tersebut? "Adam Smith" mengemukakan bahwa tujuan ilmu ekonomi adalah "*demi kesejahteraan sosial*" karena itu dia memberi judul bukunya "*An Inquiry into the nature and causes of the wealth nations (1776).*"

Jadi, menurut Adam Smith kesejahteraan sebuah bangsa yang berarti juga kesejahteraan individual, adalah kehendak alamiah.

Dalam konteks hukum investasi diartikan bahwa "*keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan antara investor dengan penerima modal, bidang2 usaha yang terbuka untuk investasi, serta mengatur tentang prosedur dan syarat2 dalam melakukan investasi dalam suatu negara.*" (T. Mulya Lubis, 1992 : 29). Berdasarkan batasan tersebut di atas, hukum investasi dikonstruksikan sebagai norma dan atau kaidah hukum. Norma dan atau kaidah hukum ini mengkaji tentang unsur2 hukum investasi yaitu : (1) adanya kaidah hukum, (2) adanya subjek, dimana subjek dalam hukum investasi adalah investor dan negara penerima investasi (3) adanya bidang usaha yang diperkenankan untuk investasi, (4) prosedur dan syarat2 untuk melakukan investasi, dan (5) negara.

Pendekatan pembangunan ekonomi yang menekankan pentingnya proses pembentukan modal merupakan suatu pendekatan yang paling berpengaruh dan bertahan lama, karena pertama, menurut Harrod-Domar menunjukkan

hubungan antara pertumbuhan investasi dengan pendapatan nasional, anggapan ini mengatakan bahwa pembentukan modal merupakan kunci bagi pertumbuhan ekonomi. Kedua, keterbatasan modal dinilai sebagai satu-satunya hambatan pokok bagi percepatan pembangunan ekonomi di setiap negara. Salah satu dimensi utama gelombang tumbuhnya investasi, baik dalam negeri maupun luar negeri adalah karena investasi mampu mendorong tumbuh dan menyebarnya perusahaan, terutama perusahaan luar negeri yang menanamkan modalnya di Indonesia, dan juga negara lainnya serta bagaimana pengaruhnya terhadap ekonomi global, terutama terhadap negara tuan rumah (host country). Hal ini menarik untuk disimak memang karena ada dua alasan, pertama, dengan dikeluarkannya PP No. 20 tahun 1994 tentang pemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing, membawa implikasi terhadap Indonesia menjadi semakin terbuka terhadap investasi asing. Kedua, Investasi di Indonesia, terutama investasi asing langsung (Foreign Direct Investment) dapat mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi secara umum, namun disisi yang lainnya membawa dampak yang kurang menguntungkan bagi tingkat pendapatan nasional kita, karena akan membawa banyak modal yang lari ke luar negeri (Capital Flight).

Disinilah negara dalam hal ini pemerintah, memberikan peran lebih dalam rangka mengatur dan mengelola semua unit-unit satuan ekonomi yang seyogianya diproteksi demi kepentingan pembangunan bangsa (*nation buildings*). Indonesia adalah Negara yang sedang berkembang. Untuk membangun

diperlukan adanya modal atau investasi yang besar, karena investasi merupakan salah satu mesin penggerak pertumbuhan ekonomi. Aktivitas penanaman modal di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1967, yakni saat dikeluarkannya UU nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing, dan UU nomor 6 tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri.

Keberadaan kedua instrument hukum itu, diharapkan agar investor asing maupun domestik untuk dapat menanamkan investasinya di Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena telah diciptakan ruang untuk memungkinkan investasi dapat tumbuh dan berkembang seiring dinamika pembangunan yang dilaksanakan secara berkelanjutan (sustainability development). Salah satu dimensi utama tumbuhnya gelombang globalisasi adalah investasi yang mendorong tumbuh dan menyebarnya perusahaan transnasional (TNC) ke seluruh penjuru dunia, karena memiliki pengaruh terhadap ekonomi global, terutama terhadap negara tuan rumah (host country). Hal ini menarik untuk dicermati karena ada dua alasan : *pertama*, dengan dikeluarkannya PP Nomor 20 tahun 1994, tentang investasi asing di Indonesia, implikasinya Indonesia semakin terbuka terhadap investasi asing. *Kedua*, Investasi asing di Indonesia terutama investasi asing langsung (foreign direct investment) sebahagian besar dilakukan oleh TNC.

Dikalangan praktisi dan teoritis pembangunan, masih terdapat perbedaan pendapat mengenai apa nama perusahaan yang beroperasi melampaui batas-batas wilayah suatu negara. Beberapa literature agaknya sependapat bahwa setidaknya ada empat evolusi perusahaan dalam era globalisasi yakni :

(1) perusahaan domestik, (2) perusahaan internasional, (3) perusahaan multinasional, dan (4) perusahaan global. Seiring berjalannya waktu, perusahaan domestik yang telah dewasa biasanya akan melakukan internasionalisasi bisnisnya. Dalam prakteknya, perusahaan tersebut dapat tumbuh menjadi perusahaan internasional, perusahaan multinasional, atau perusahaan global. Perbedaan antara perusahaan internasional, multinasional, dan global adalah mencakup perbedaan dalam focus, visi, orientasi, gaya operasi, strategi, struktur organisasi, strategi pemasaran, focus lokasi riset dan pengembangan, kebijakan penempatan alokasi sumberdaya manusia, pola komunikasi, kebijakan pengembangan produk baru, kemitraan, dan kebijakan investasi (Keegan, 1989 : 163).

A. MASALAH.

Sebagaimana materi pokok yang diuraikan pada pendahuluan di atas, bahwa investasi dapat dipandang sebagai suatu pembentukan modal dan unsure pembelanjaan barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Dengan demikian masalah pokok yang dapat dibedah dalam makalah ini adalah sebagai berikut :

- ❖ Apakah hadirnya investor asing di Indonesia dapat membawa perubahan dalam pembangunan ekonomi?.
- ❖ Apakah dengan penanaman modal dalam suatu negara memberi implikasi positif bagi masyarakat yang berada disekitar lokasi proyek?.

- ❖ *Apakah dengan diberlakukannya perangkat hukum dapat memberikan ruang dan kesempatan bagi para investor menanamkan modalnya di Indonesia?*

B. OBJEK DAN RUANG LINGKUP KAJIAN HUKUM INVESTASI.

o Keberadaan Investor asing dan domestik di Indonesia.

Secara teoritis, pembelanjaan investasi memiliki 3 jenis. Salah satu diantaranya adalah pembelian berbagai jenis barang modal, yakni mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan. Jenis pembelanjaan investasi tersebut mengedepankan peran ekonomi pemerintah khususnya melalui BUMN dan BUMD, serta disesuaikan dengan aturan hukum yang berlaku. Misalnya, jenis usaha, jumlah nilai suatu proyek yang diinvestasikan, berapa lama proyek tersebut beroperasi, dan memiliki izin usaha yang sah dan benar untuk beroperasi di suatu negara.

Telahaan objek, ruang lingkup dan kajian hukum, merupakan sasaran didalam penyelidikan atau pengkajian hukum investasi. Objek itu dibagi menjadi dua macam yaitu objek materiil objek forma. Objek materiil, yaitu bahan (materiil) yang dijadikan sasaran dalam penyelidikannya. Objek materiil hukum investasi adalah manusia dan investasi. Sedangkan Objek Forma, yakni sudut pandang tertentu terhadap objek materiilnya. Jadi, objek forma hukum investasi adalah mengatur :

1. Hubungan antara investor dengan negara penerima modal
2. Bidang-bidang usaha yang terbuka untuk investasi, serta

3. Prosedur dan syarat-syarat dalam melakukan investasi pada suatu Negara.

Hubungan antara investor dengan penerima modal sangat erat karena investor sebagai pemilik uang/modal akan bersedia menanamkan investasinya di negara penerima modal, dan negara penerima modal harus dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan rasa aman bagi investor dalam berusaha. Tanpa adanya kepastian dan perlindungan hukum, serta rasa aman, mustahil mereka akan menanamkan investasinya. Setiap investor, khususnya investor asing, selalu menanyakan tentang kepastian dan perlindungan hukum, serta rasa aman tersebut. Negara penerima modal, juga selalu mengatakan bahwa negaranya siap menjamin kepastian, perlindungan hukum, dan rasa aman kepada mereka.

Bidang-bidang usaha yang terbuka untuk investasi merupakan bidang usaha yang diperkenankan untuk dilakukan investasi, baik untuk investasi domestik maupun investasi asing. Biasanya, dalam penanaman investasi, khususnya investasi asing, ada beberapa bidang usaha yang tidak diperkenankan sama sekali untuk dilakukan investasi dan ada juga bidang usaha yang diwajibkan untuk melakukan kerja sama antara modal asing dengan modal domestik. Prosedur dan syarat-syarat merupakan tatacara yang ditentukan oleh Negara penerima modal dalam pelaksanaan investasi dalam suatu Negara. Biasanya, prosedur dan syarat-syarat itu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- ### **o Implikasi positif bagi masyarakat yang berada disekitar lokasi proyek?.**

- ❖ *Apakah dengan diberlakukannya perangkat hukum dapat memberikan ruang dan kesempatan bagi para investor menanamkan modalnya di Indonesia?*

B. OBJEK DAN RUANG LINGKUP KAJIAN HUKUM INVESTASI.

o Keberadaan Investor asing dan domestik di Indonesia.

Secara teoritis, pembelanjaan investasi memiliki 3 jenis. Salah satu diantaranya adalah pembelian berbagai jenis barang modal, yakni mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan. Jenis pembelanjaan investasi tersebut mengedepankan peran ekonomi pemerintah khususnya melalui BUMN dan BUMD, serta disesuaikan dengan aturan hukum yang berlaku. Misalnya jenis usaha, jumlah nilai suatu proyek yang diinvestasikan, berapa lama proyek tersebut beroperasi, dan memiliki izin usaha yang syah dan benar untuk beroperasi di suatu negara.

Telaahan objek, ruang lingkup dan kajian hukum, merupakan sasaran didalam penyelidikan atau pengkajian hukum investasi. Objek itu dibagi menjadi dua macam yaitu objek materiil objek forma. Objek materiil, yaitu bahan (materiil) yng dijadikan sasaran dalam penyelidikannya. Objek materiil hukum investasi adalah manusia dan investasi. Sedangkan Objek Forma, yakni sudut pandang tertentu terhadap objek materiilnya. Jadi, objek forma hukum investasi adalah mengatur :

1. Hubungan antara investor dengan negara penerima modal
2. Bidang-bidang usaha yang terbuka untuk investasi, serta

3. Prosedur dan syarat-syarat dalam melakukan investasi pada suatu Negara.

Hubungan antara investor dengan penerima modal sangat erat karena investor sebagai pemilik uang/modal akan bersedia menanamkan investasinya di negara penerima modal, dan negara penerima modal harus dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan rasa aman bagi investor dalam berusaha. Tanpa adanya kepastian dan perlindungan hukum, serta rasa aman, mustahil mereka akan menanamkan investasinya. Setiap investor, khususnya investor asing, selalu menanyakan tentang kepastian dan perlindungan hukum, serta rasa aman tersebut. Negara penerima modal, juga selalu mengatakan bahwa negaranya siap menjamin kepastian, perlindungan hukum, dan rasa aman kepada mereka.

Bidang-bidang usaha yang terbuka untuk investasi merupakan bidang usaha yang diperkenankan untuk dilakukan investasi, baik untuk investasi domestik maupun investasi asing. Biasanya, dalam penanaman investasi, khususnya investasi asing, ada beberapa bidang usaha yang tidak diperkenankan sama sekali untuk dilakukan investasi dan ada juga bidang usaha yang diwajibkan untuk melakukan kerja sama antara modal asing dengan modal domestik. Prosedur dan syarat-syarat merupakan tatacara yang ditentukan oleh Negara penerima modal dalam pelaksanaan investasi dalam suatu Negara. Biasanya, prosedur dan syarat-syarat itu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- o *Implikasi positif bagi masyarakat yang berada disekitar lokasi proyek?*

Keberadaan investasi yang ditanamkan oleh investor, terutama modal asing, ternyata memberikan dampak positif didalam investasi asing atau perusahaan asing (Adi Harsono, 2003 : 1-3) di berbagai negara. Dampak yang dikemukakan oleh pendapat di atas tersebut didasarkan pada bukti-bukti dari keberadaan investasi asing atau perusahaan asing. Bukti-bukti tersebut dapat diasajikan sebagai berikut :

1. Masalah Gaji.

Perusahaan asing membayar gaji pegawainya lebih tinggi dibandingkan gaji rata-rata nasional. Di Amerika misalnya, perusahaan asing membayar 4 % lebih tinggi pada tahun 1989 dan 6 % lebih tinggi daripada tahun 1996 dibandingkan perusahaan domestic.

2. Perusahaan asing menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat jika dibandingkan perusahaan domestic sejenis. Di Amerika, jumlah lapangan kerja yang diciptakan perusahaan asing mencapai 1,4% per tahun dari 1989 sampai dengan 1996. Bandingkan dengan 0,8% yang diciptakan oleh perusahaan domestik. Di Inggris dan Perancis, lapangan kerja di perusahaan asing 1,7% per tahun, sebaiknya lapangan kerja di perusahaan domestic justru menyusut sebesar 2,7%. Hanya di Jerman dan Belanda, perusahaan asing tidak banyak berbeda dengan perusahaan domestic.

3. Perusahaan asing tidak segan-segan mengeluarkan biaya di bidang pendidikan. Jumlah pelatihan dan bidang penelitian (R&D) di negara tempat mereka menanamkan investasinya mencapai 12% dari total pengeluaran R & D di Amerika Serikat, di Perancis 19% dan 40% di Inggris.

4. Perusahaan asing cenderung mengekspor lebih banyak di bandingkan perusahaan domestik. Sebagai bahan perbandingan jumlah investasi yang diinvestasikan oleh para investor, baik investor domestic maupun investor asing pada masa orde baru mengalami kenaikan, sementara pada masa reformasi mengalami penurunan. Pada masa orde baru, jumlah investasi yang diinvestasikan di Indonesia cukup tinggi. Hal ini disebabkan stabilitas politik, ekonomi, keamanan, dan pertahanan, social dan kemasyarakatan dalam keadaan aman dan terkendali, sehingga para investor mendapat perlindungan dan jaminan keamanan dalam berusaha di Indonesia. Sedangkan jumlah investasi yang masuk ke Indonesia sejak masa reformasi mengalami penurunan. Tahun 1998 sampai dengan tahun 2008 merupakan masa transisi, yaitu dari masa orde baru ke masa reformasi. Pada masa reformasi ini sering terjadi konflik dalam masyarakat. Konflik pertama terjadi pada 21 Mei 1998, yaitu pada saat diturunkannya Soeharto sebagai presdient RI, dan sebagai awal tonggak dimulainya masa reformasi. Inilah beberapa contoh yang sengaja diangkat dalam rangka melakukan refleksi terhadap penanaman modal di Indonesia.

5. Investor asing dapat menutupi kecukupan tabungan dalam negeri untuk investasi sebagai faktor penghambat utama bagi perkembangan perekonomian yang cepat bagi daerah. Perbaikan tingkat hidup dari tahun ke tahun. secara terus menerus dalam waktu lama hanya dapat dijamin dengan ekspansi

kapasitas produksi yang sebagian besar tergantung pada luasnya pembentukan modal. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi umumnya hanya terdapat di negara-negara yang sebagian besar dari hasil nasionalnya diinvestasikan. Rasio antara investasi dan output (COR) bukan satu-satunya alat yang menentukan perkembangan ekonomi. Rasio capital dan output (*Capital Output Ratio*) ini perlu dibedakan antara :

- Ratio capital output rata-rata (*Average Capital Output Ratio/ Ratio ACOR*) yang dipengaruhi oleh tingkat penggunaan kapasitas produksi dan Incremental Capital Output Ratio yang mengukur produktivitas investasi di daerah sering menjadi pemicu hanya karena persoalan tentang kepastian hukum orang berinvestasi.
- Bantuan luar negeri yang kadang langsung berhubungan dengan daerah tanpa melewati prosedur dan mekanisme Departemen Perdagangan RI, menjadi kendala karena kental dengan nuansa politik, sehingga daerah menjadi banyak yang dirugikan.
- Bagi daerah-daerah seperti di NTT, menjadi kendala secara kedaerahan tanpa mendapat suntikan dana cadangan dari pemerintah pusat, karena bargaining power ke pusat terkadang harus ditebus dengan harga sangat mahal, sehingga dengan begitu daerah rasanya sulit untuk mendapatkan akses dana yang cukup untuk pengembangan usaha-usaha industri yang lebih berkembang.

Bagi daerah-daerah yang sudah maju, memiliki tabungan yang cukup

besar, akan tetapi kebanyakan daerah tersebut tidak menggunakan tabungan untuk membiayai investasi yang dapat menjamin tingkat perkembangan yang cukup di daerah mereka. Kebanyakan negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia tabungan untuk investasi lebih dari 10 % dari produksi nasional. Hal ini menurut "Rostow" adalah hal yang diperlukan untuk lepas landas (*Take Off*) ke pertumbuhan yang ditopang sendiri (*Self Sustaining Growth*). Kondisi seperti ini tidak akan mungkin NTT dapat bergerak maju seperti daerah-daerah lainnya di Indonesia, karena salah satu ciri khas daerah yang mau maju adalah daerah tersebut haruslah dibantu dengan industri yang berkembang pesat, baik dari aspek pola manajemen maupun dari pola roda organisasi.

o **Dengan diberlakukannya perangkat hukum dapat memberikan ruang dan kesempatan bagi para investor menanamkan modalnya di Indonesia**

1. Asas-Asas hukum investasi.

Undang-Undang nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing jo. Undang-Undang nomor 11 tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal dalam negeri jo. Undang-undang nomor 12 tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan undang-undang nomor 6 tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri tidak ditemukan sebuah ketentuan yang menyebutkan tentang asas-asas hukum didalam pelaksanaan investasi di Indonesia. Namun, perlu mengkaji berbagai ketentuan yang terdapat didalamnya, dapat ditemukan beberapa asas hukum yang berkaitan dengan

investasi. Asaz-asaz hukum itu dapat dikemukakan sebagai berikut :

1.1 Asaz ekonomi perusahaan, asaz dimana didalam perusahaan penanaman investasi dapat diusahakan dan dilakukan secara optimal, dan sesuai dengan prinsip efisiensi (pasal 26 UUPMA).

1.2 Asaz hukum internasional asaz didalam penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan penanam modal, apabila pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi/pencabutan hak milik secara menyeluruh, dan penyelesaiannya harus didasarkan pada asaz hukum internasional (Pasal 21 UUPMA).

1.3 Asaz demokrasi ekonomi, yaitu asaz dimana didalam penanaman investasi didasarkan prinsip demokrasi ekonomi (penjelasan pasal 4 undang-undang nomor 6 tahun 1968 tentang PMDN).

1.4 Asaz manfaat, merupakan asaz, dimana didalam penanaman investasi dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemaakmuran rakyat Indonesia.

Didalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal telah ditentukan 10 asaz yang kemudian dapat disajikan sebagai berikut :

1.4.1. Asaz kepastian hukum, asaz dalam Negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

1.4.2. Asaz keterbukaan, yaitu terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan

tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

1.4.3. Asaz akuntabilitas, yaitu menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4.4. Asaz perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara adalah asaz perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal dari suatu negara asing dan penanam modal dari Negara asing lainnya.

1.4.5. Asaz kebersamaan, yaitu, asaz yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

1.4.6. Asaz efisiensi berkeadilan, asaz yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

1.4.7. Asaz berkelanjutan, asaz yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

1.4.8. Asaz berwawasan lingkungan, asaz penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan

mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

1.4.9. Asas kemandirian, asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

1.4.10. Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional adalah, asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

2. Hambatan penanaman investasi di Indonesia.

Sejak terjadinya reformasi, jumlah investasi, baik domestik maupun asing mengalami penurunan yang sangat drastis. Hal ini terlihat pada data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), bahwa pada periode Januari-oktober 2004 jumlah investasi asing 8,85 miliar dollar AS, dengan jumlah proyek sebanyak 969 proyek, sedangkan sebelum reformasi, yaitu pada tahun 1995, jumlah investasi asing yang ditanamkan di Indonesia sebanyak 39.891 miliar dollar AS, sedangkan jumlah proyeknya sebanyak 783 proyek pada tahun 1995. Ini disebabkan negara dalam keadaan stabil. Ini menunjukkan dalam orde reformasi, jumlah investasi asing yang masuk ke Indonesia mengalami penurunan, sedangkan sebelum reformasi jumlah investasi asing yang masuk ke Indonesia mengalami kenaikan yang sangat besar. Ada 2 hambatan atau kendala yang dihadapi untuk mendatangkan investasi asing, sebagaimana yang diinventarisasi oleh BKPM, yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Hal-hal yang termasuk dalam kendala internal adalah :

2.1. Kesulitan perusahaan mendapatkan lahan atau lokasi proyek yang sesuai

2.2. Kesulitan memperoleh bahan baku

2.3. Kesulitan dana/pembiayaan

2.4. Kesulitan pemasaran

2.5. Adanya sengketa atau perselisihan diantara pemegang saham. Sedangkan kendala eksternal meliputi :

2.6. Faktor lingkungan bisnis, baik nasional, regional, dan global yang tidak mendukung serta kurang menariknya insentif atau fasilitas investasi yang diberikan pemerintah

2.7. Masalah hukum

2.8. Keamanan, maupun stabilitas politik yang merupakan faktor eksternal ternyata menjadi faktor penting bagi investor untuk menanamkan modal di Indonesia

2.9. Adanya peraturan daerah, keputusan menteri, undang-undang yang turut mendistorsi kegiatan penanaman modal.

2.10. Adanya undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang kehutanan yang menimbulkan ketidakpastian dalam pemanfaatan areal hutan bagi industri pertambangan.

Menurut "Kepala BKPM" Muhammad Lutfi : ada 6 faktor penyebab turunnya realisasi investasi asing di Indonesia sebagai berikut :

1. Menurunnya komitmen investasi tahun 2004 dan 2005 dibanding tahun 2003
2. Kenaikan bahan bakar minyak (BMM) yang mendorong kenaikan nilai investasi dan ongkos produksi
3. Krisis ketenagalistrikan di sepuluh wilayah di Indonesia
4. Krisis gas di Jawa Barat dan Jawa Timur sehingga menunda ekspansi usaha
5. Masalah perburuan, dan

6. Harmonisasi tarif pajak. (Kompas, 6 desember 2006 : 17). Sedangkan menurut "Airlangga Hartarto" ada tiga masalah utama yang membuat iklim investasi di Indonesia yang kurang kondusif antara lain :

- (1) Soal prosedur, (2) birokrasi, serta
- (3) kejelasan instansi yang berwenang dan lingkup urusan bidang investasi.

C. PENUTUP.

1. Kesimpulan.

Ada beberapa kesimpulan yang merupakan uraian pembahasan yang telah dipaparkan di atas yakni :

- a. Bahwa pelaksanaan penanaman investasi di Indonesia membutuhkan peran serta pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif demi terwujudnya peningkatan tingkat pertumbuhan ekonomi.
- b. Penanaman investasi di Indonesia harus membawa dampak positif bagi terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia.
- c. Iklim investasi yang kondusif harus tetap perlu ditumbuhkan dengan

memberikan ruang dan akses yang seluas-luasnya berbasis kaidah dan atau norma hukum demi terwujudnya rasa keadilan dan kepastian hukum.

2. Saran-Saran.

- a. Kepada para investor, agar sebaik apapun pelaksanaan penanaman investasi harus membawa peningkatan hidup bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang ada disekitar daerah lokasi proyek

- b. Agar Pemerintah Daerah, senantiasa membangun kerjasama dengan pihak-pihak yang berkepentingan demi meningkatkan minat investor untuk datang ke daerah, karena memiliki multiplayer efek yang luar biasa besarnya bagi masyarakat setempat.

- c. Pemerintah Pusat dan daerah, perlu menyesuaikan peraturan perundang-undangan mengenai investasi yang cocok dan sesuai dengan kondisi daerah, dan dapat meningkatkan rasa aman yang menimbulkan keagairahan untuk berinvestasi di Indonesia.

DAFTAR BAHAN BACAAN.

Barrie Dustan, *"The Secrets of Investment Legends"*, Intan Persada Bhakti, Jakarta, 2009.

Irawan dan Suparmoko, *"Ekonomika Pembangunan"*, Edisi ke enam, BPFE, Yogyakarta, 2002.

H. malayu S.P. Hasibuan, *"Manajemen, Dasar, Pengertian dana Masalah."* Edisi Revisi, Bumi Aksara, Bandung, 2001.

- Catatan Harian Kuliah, "Materi Matrikulasi Pengantar Ekonomi makro Unika Widya mandira Kupang." 2010.
- Lincoln Arsyad, "Ekonomi Pembangunan", Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 1992.
- Mudrajad Kuncoro, "Ekonomi Pembangunan (Teori, masalah dan kebijakan)" UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 1977.
- Irawan dan M. Suparmoko, "Ekonomi Pembangunan", edisi ke tiga, BPFE Yogyakarta, 1979
- Sadono Sukirno, "Ekonomi Pembangunan" (Proses, dan dasar kebijaksanaan), Bima BG Grafika Petaling Jaya, 1978.
- Salim Hs dan Budi Sutrisno, "Hukum Investasi di Indonesia", PT. RajawaliGrafiko Persada, Mataram, 2007.
- Kompas, 2006, jumat, "24 Mei No 163/XXI, hal 9"....BKPM....Jakarta
- Muhammad Lutfi, 2005, "Transkrip akhir tahun BKPM ttg Investasi Indonesia" Jakarta